

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah Dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan) tahun 2021 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) dan sebagai dasar pengusulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan Provinsi.

Tahapan Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan. Proses di dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD;
- b. Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan di dalam Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati Bersama dan mempertimbangkan pagu PD;
- c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan.
- d. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan.
- e. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,

Dengan demikian RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan acuan dalam penyempurnaan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam tahun yang sama, sehingga diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021, memiliki sinergitas dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara RI tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara RI nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran neraca RI tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan gangguan keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
 18. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembubaran BAKORSTANAS, maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan TARPADNAS dialihkan ke Departemen Dalam Negeri dan sesuai Dinamika Sosial Politik, pola TARPADNAS di kaji ulang dan disempurnakan menjadi Pemantapan Ketahanan Bangsa ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah terakhir diubah dengan Permendagri nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah ;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 30. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim terpadu Tingkat Pusat Penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 32. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor I Tahun 2013 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 35. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021.
 36. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 220/013/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 tentang Tim Tim Terpadu Provinsi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 37. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 300/025/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.
 38. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 330/027/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 tentang Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah dan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Prov.Sulteng Tahun 2019.
 39. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 342/026/BAKESBANGPOL-G.ST/2019 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah Prov.Sulteng Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja semester I Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
2. Memasukkan perubahan kinerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Perubahan Tahun 2021.
3. Penyesuaian target kinerja dan Pagu Kegiatan (penambahan atau pengurangan);
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
5. Menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Prinsip Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 :

1. Substansi Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perbaikan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi triwulan II/semester I Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.
3. Terkait hal pendanaan pasca refocusing penanganan covid-19 yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja adalah memprioritaskan pendanaan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersifat mengikat namun tidak tersedia anggaran karena refocusing.
4. Terkait adanya Dana Hibah Pengmanan Daerah dan Pemberdayaan Ormas.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja-P Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-P Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun anggaran 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 6 Program dan 13 Kegiatan 61 Sub Kegiatan yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 untuk memberikan kontribusi positif bagi tatanan kehidupan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Triwulan II tahun 2021 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan | Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Realisasi Program Kegiatan 2020 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Taget Renja 2019 | Realisasi Renja 2019 | Tingkat Realisasi (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6)*100 | 9 |
| 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | |
| 4 01 | Administrasi Pemerintahan | | | | | | | |
| 4 01 4 01 15 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%) | 80 % | 40 % | 60 % | 60 % | 100 | 80 % |
| 4 01 4 01 15 01 01 22 | - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran | Tercapainya Pelayanan Administrasi yang tepat waktu | 80 % | 40 % | 60 % | 60 % | 100 | 80 % |
| 4 01 4 01 15 01 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 80 % | 40 % | 60 % | 60 % | 100 | 80 % |
| 4 01 4 01 15 01 02 08 | - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tercapainya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas | 20 unit | 32 unit | 15 unit | 32 unit | 213 | 33 Unit |
| 4 01 4 01 15 01 02 22 | - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 100 | 0 |
| 4 01 4 01 15 01 02 24 | - Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor | Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 19 unit/buah | 90 unit/buah | 15 unit/buah | 20 unit/buah | 133 | 59 unit/buah |
| 4 01 4 01 15 01 02 26 | - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tercapainya Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor | 15 unit/buah | 111 unit/buah | 12 unit/buah | 45 unit/buah | 375 | 0 |
| 4 01 4 01 15 01 03 | Program Peningkatan | Persentase Peningkatan | 80 % | | 60 % | 30 % | 50 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|--|--|
| | | | | | | | | Disiplin Aparatur | Disiplin Aparatur | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 03 | 02 | - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya | 100 % | 0 | 100 % | 100 % | 100 | 0 | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 03 | 02 | - Pengadaan Pakaian Korpri, Batik Khas Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya | Tercapainya Pengadaan Pakaian Korpri, Batik dan Pakaian Olahraga | 100 % | | 100 % | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya | 80 % | 40 % | 60 % | 60 % | 100 | 80 % | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 05 | 07 | - Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 8 org | 31 org | 8 org | 8 Org | 100 | 8 Org | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketetapan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 100 % | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 06 | 01 | - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Termanfaatnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13 dok/lap | 13 dok/lap | 13 dok/lap | 13 dok/lap | 100 | 13 dok/lap | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 06 | 02 | - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Termanfaatkan Laporan Keuangan Semesteran | 2 dok/lap | 2 dok/lap | 2 dok/lap | 2 dok/lap | 100 | 2 dok/lap | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 06 | 09 | - Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur | 1 dok/lap | 1 dok/lap | 1 dok/lap | 1 dok/lap | 100 | 1 dok/lap | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 07 | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan | 3 dok/lap | 3 dok/lap | 3 dok/lap | 3 dok/lap | 100 | 3 dok/lap | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 07 | 10 | - Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan | Termanfaatnya Dokumen Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Koordinasi dan Sinkronisasi Program yang di sepakati Bersama | 2 dok/lap | 2 dok/lap | 2 dok/lap | 2 dok/lap | 100 | 2 dok/lap | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 07 | 13 | - Monitoring, Evaluasi | Jumlah Dokumen hasil | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 Laporan | | |

| | | | | | | | | dan Pelaporan | Monitoring yang berisi hasil Konsultasi/ Koordinasi/Perencanaan | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|----|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 90 | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di semua elemen Masyarakat | 500 org | 1105 org | 500 org | 700 org | 140 | 75 Org |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 90 | 01 | - Forum Pembauran Kebangsaan | Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan | 50 org | 50 org | 50 org | 100 org | 200 | 25 Org |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 90 | 02 | - Dialog Kebangsaan | Terlaksananya Dialog Kebangsaan | 100 org | 125 org | 100 org | 100 org | 100 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 90 | 03 | - Pembinaan Kesadaran Bela Negara | Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara | 100 org | 260 org | 100 org | 100 org | 100 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 90 | 04 | - Forkom peningkatan peran Generasi Muda dan Pramuka | Terlaksananya Forkom peran Generasi Muda dan Pramuka | 75 org | 180 org | 75 org | 100 org | 133 | 50 Org |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 90 | 05 | - Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda | Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda | 75 org | 185 org | 75 org | 100 org | 133 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 90 | 06 | - Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah | Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah | 50 org | 180 org | 50 org | 100 org | 200 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 90 | 07 | - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat | 50 org | 125 org | 50 org | 100 org | 200 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 91 | | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara Anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda | 500 Org | 440 org | 500 org | 300 org | 60 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 91 | 01 | Orientasi Ketahanan Bangsa | Terlaksananya Orientasi Ketahanan Bangsa | 125 Org | 150 org | 125 org | 100 org | 80 | 0 |

*Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021*

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 91 | 02 | - Sosialisasi, Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan | Terlaksananya Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan | 125 Org | 150 org | 125 org | 100 org | 80 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 91 | 03 | - Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK & Orkemas | Terlaksananya Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkemas | 125 org | 140 org | 125 org | 100 org | 80 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 91 | 04 | - Pendidikan Wawasan Kebangsaan | Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan | 125 org | 195 org | 125 org | 100 org | 80 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 92 | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah | 76 % | 69.79 % | 76 % | 75.29 % | 99 | 77.27 % |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 92 | 02 | - Pemantapan Etika dan Budaya Politik | Terlaksananya Sosialisasi Pemantapan Etika dan Budaya Politik | 150 org | 150 org | 150 org | 150 org | 100 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 92 | 03 | - Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah | Terpantaunya Proses Politik di Daerah | 1 dok/lap | 1 dok/lap | 1 dok/lap | 1 dok/lap | 100 | 1 dok/lap |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 92 | 04 | - Forum Komunikasi Politik | Terlaksananya Forum Komunikasi Politik | 150 org | 150 org | 150 org | 150 org | 100 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 92 | 05 | - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bid. Politik | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bid. Politik | | 150 org | 150 org | 250 org | 167 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 92 | 06 | - Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia | Terlaksananya Focus Group Discussion dan terkumpulnya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 100 | 1 Lap |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Menurunnya Jumlah Konflik/Kasus yang terjadi di Masyarakat Prov. Sulteng | 2 konflik | 2 konflik | 3 konflik | 2 konflik | 67 | 2 Konflik |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | 01 | - Pengamatan, Pengawasan, (Matwas) | Terlaksananya Monitoring, Pemantauan, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan | 1 laporan | 1 lap | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 4 Laporan |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | 02 | - Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) | Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Kab/Kota Se Sulteng | 150 org | 130 org | 150 org | 100 org | 67 | 20 Org |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | 03 | - Koordinasi Pemantauan | Terlaksananya Pemantauan | 125 org | 100 org/lap | 100 org | 60 org/laporan | 60 | 30 org/laporan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah | Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | 04 | - Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Pemantauan Koordinasi dan Konsultasi serta Evaluasi dan Pelaporan | 200 org/lap | 180 org/lap | 200 org/lap | 105 org/laporan | 53 | 30 org/laporan | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | 05 | - Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas | 130 org/lap | 300 org/lap | 130 org/lap | 150 org/laporan | 115 | 75 org/laporan | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | 06 | - Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara | Terlaksananya sosialisasi Keg. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara yang dilakukan di Kab/Kota di Prov. Sulteng | 125 org | 200 org | 125 org | 150 org | 120 | 0 | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | 07 | - Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal | Terlaksananya Sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas | 125 org | 200 org | 125 org | 150 org | 120 | 0 | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 93 | 08 | - Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan | Terlaksananya Sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas | 125 org | 120 org | 120 org | 120 org | 100 | 205 org | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 94 | | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat | 325 org | 250 org | 275 org | 275 org | 100 | 50 org | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 94 | 01 | - Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu | Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Peredaran Uang Palsu di Masyarakat | 150 org | 125 org | 125 org | 125 org | 100 | 0 | | | | |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 94 | 02 | - Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika | 175 org | 125 org | 150 org | 150 org | 100 | 50 org | | | | |

| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 95 | | Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan. | 340 Org/lap | 345 Org/lap | 345 Org/lap | 345 Org/lap | 100 | 150 org/lap |
|---|----|---|----|----|----|----|----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 95 | 01 | - Forkom Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap perkembangan Kebudayaan /Kesenian Di daerah | Terfasilitasi Forkom peningkatan peran masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan/kesenian di daerah | 100 org | 100 org | 100 org | 100 org | 100 | 100 org |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 95 | 02 | - Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi ormas LSM/Pengembangan seni budaya | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 1 lap | 100 | 1 lap |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 95 | 03 | - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | Terlaksananya Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | 30 org | 30 org | 30 org | 30 org | 100 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 95 | 04 | - Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM | Terlaksananya Forkom Peran Ormas/LSM | 100 org | 100 org | 100 org | 100 org | 100 | 50 org |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 95 | 05 | - Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM | Terlaksananya Bintek Aplikasi Ormas/LSM | 30 org | 30 org | 30 org | 30 org | 100 | 0 |
| 4 | 01 | 4 | 01 | 15 | 01 | 95 | 06 | - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | Terlaksananya Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | 80 org | 85 org | 85 org | 85 org | 100 | 0 |

Tabel 2.2 Evaluasi Realisasi sampai dengan Tahun 2020
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke- | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke- | | |
|-------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | | |
| 4 0 1 | Administrasi Pemerintahan | 6,056,279,159.00 | 6,149,324,274.00 | 2,757,276,730.00 | 5,927,495,627.00 | 6,104,500,150.00 | 2,728,582,752.00 | 97.87 | 99.27 | 98.96 |
| 4 0 1 4 0 1 5 1 0 0 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,089,084,424.00 | 1,270,050,628.00 | 1,101,513,460 | 1,056,694,980.00 | 1,262,348,254.00 | 1,080,651,979 | 97.03 | 99.39 | 98.11 |
| 4 0 1 4 0 1 5 1 0 0 2 2 | - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran | 1,089,084,424 | 1,270,050,628.00 | 1,101,513,460 | 1,056,694,980 | 1,262,348,254.00 | 1,080,651,979 | 97.03 | 99.39 | 98.11 |
| 4 0 1 4 0 1 5 1 0 0 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah | 950,321,006.00 | 1,482,843,800.00 | 347,324,553.00 | 905,658,125.00 | 1,461,132,554.00 | 342,469,931.00 | 95.30 | 98.54 | 98.60 |
| 4 0 1 4 0 1 5 1 0 0 0 8 | - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 388,567,625 | 347,843,800 | 314,407,353 | 381,559,000 | 340,703,204 | 309,552,731 | 98.20 | 97.95 | 98.46 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|----------------|---------------|--------|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | 95,146,625 | 125,000,000 | - | 95,000,000 | 124,999,150 | - | 99.85 | 100.00 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor | 25,316,000 | 30,000,000 | 32,917,200 | 25,067,500 | 30,000,000 | 32,917,200 | 99.02 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 441,290,756 | 980,000,000 | - | 404,031,625 | 965,430,200 | - | 91.56 | 98.51 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 44,250,000 | - | - | 44,250,000 | - | #DIV/0! | 100.00 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - Pengadaan Pakaian Dinas beserta PerlengkapanNya | - | 44,250,000 | - | - | 44,250,000 | - | - | - | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - Pengadaan Pakaian Korpri, Batik Khas Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 56,900,000 | 29,400,000 | 4,500,000.00 | 55,443,200 | 29,400,000 | 4,500,000.00 | 97.44 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | 56,900,000 | 29,400,000 | 4,500,000 | 55,443,200 | 29,400,000 | 4,500,000 | 97.44 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 148,045,000.00 | 140,121,200.00 | 71,938,600.00 | 146,153,900.00 | 139,180,300.00 | 71,938,600.00 | 98.72 | 99.33 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26,650,300 | 30,000,000 | 14,820,000 | 26,650,300 | 30,000,000 | 14,820,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 3,287,500 | 5,000,000 | 1,819,000 | 3,287,500 | 5,000,000 | 1,819,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal | 118,107,200 | 105,121,200 | 55,299,600 | 116,216,100 | 104,180,300 | 55,299,600 | 98.40 | 99.10 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan | 727,612,183.00 | 582,759,200.00 | 210,728,767.00 | 710,474,947.00 | 580,001,288.00 | 210,606,950.00 | 97.64 | 99.53 | 99.94 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan | 321,610,768 | 388,927,000 | 50,734,150 | 318,122,448 | 388,146,800 | 50,734,150 | 98.92 | 99.80 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 406,001,415 | 193,832,200 | 159,994,617 | 392,352,499 | 191,854,488 | 159,872,800 | 96.64 | 98.98 | 99.92 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 542,075,421.00 | 369,637,400.00 | 135,645,400.00 | 536,893,900.00 | 369,037,400.00 | 135,345,400.00 | 99.04 | 99.84 | 99.78 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Forum Pembauran Kebangsaan | 119,019,000 | 71,380,000 | 21,538,100 | 118,019,000 | 70,780,000 | 21,538,100 | 99.16 | 99.16 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Dialog Kebangsaan | 40,413,250 | 33,422,000 | - | 40,413,200 | 33,422,000 | - | 100.00 | 100.00 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Pembinaan Kesadaran Bela Negara | 163,310,171 | 102,595,800 | 95,883,900 | 161,095,000 | 102,595,800 | 95,583,900 | 98.64 | 100.00 | 99.69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Forkom peningkatan peran Generasi Muda dan Pramuka | 52,413,000 | 64,096,600 | 18,223,400 | 52,313,000 | 64,096,600 | 18,223,400 | 99.81 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Pelatihan Penigkatan Wawasan Pemuda | 54,749,000 | 32,261,400 | - | 54,659,000 | 32,261,400 | - | 99.84 | 100.00 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah | 64,421,000 | 32,194,000 | - | 62,694,700 | 32,194,000 | - | 97.32 | 100.00 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat | 47,750,000 | 33,687,600 | - | 47,700,000 | 33,687,600 | - | 99.90 | 100.00 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 231,484,250.00 | 237,278,873.00 | 78,810,600.00 | 231,261,700.00 | 234,787,400.00 | 77,915,600.00 | 99.90 | 98.95 | 98.86 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | Orientasi Ketahanan Bangsa | 53,661,000 | 102,015,400 | - | 53,661,000 | 102,015,400 | - | 100.00 | 100.00 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Sosialisasi, Seminar Peningkatan Wawasan | 59,025,000 | 67,813,473 | 68,819,200 | 58,902,500 | 65,322,000 | 67,924,200 | 99.79 | 96.33 | 98.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | Kebangsaan | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK & Orkemas | 63,688,250 | 33,681,400 | - | 63,588,200 | 33,681,400 | - | 99.84 | 100.00 | - | | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Pendidikan Wawasan Kebangsaan | 55,110,000 | 33,768,600 | 9,991,400 | 55,110,000 | 33,768,600 | 9,991,400 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 798,659,700 | 775,729,558 | 388,296,000 | 792,428,700 | 773,979,558 | 387,336,000 | 99.22 | 99.77 | 99.75 | | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Pemantapan Etika dan Budaya Politik | 66,842,200 | 110,849,400 | 3,580,000 | 66,492,200 | 110,849,400 | 3,570,000 | 99.48 | 100.00 | 99.72 | | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Analisa Perkembang an Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah | 294,459,200 | 316,441,958 | 315,080,900 | 290,778,200 | 316,441,958 | 314,530,900 | 98.75 | 100.00 | 99.83 | | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Forum Komunikasi Politik | 118,786,700 | 124,179,400 | 4,732,000 | 116,936,700 | 124,179,400 | 4,332,000 | 98.44 | 100.00 | 91.55 | | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Bid. Politik | 78,795,000 | 144,074,400 | 55,903,000 | 78,795,000 | 143,824,400 | 55,903,000 | 100.00 | 99.83 | 100.00 | | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Kelompok | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia | 239,776,600 | 80,184,400 | 9,000,100 | 239,426,600 | 78,684,400 | 9,000,100 | 99.85 | 98.13 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 913,227,600 | 717,235,178 | 210,158,350 | 905,386,600 | 713,598,624 | 209,633,342 | 99.14 | 99.49 | 99.75 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Pengamatan , Pengawasan, (Matwas) | 191,938,800 | 149,422,504 | 63,809,542 | 191,083,300 | 146,795,624 | 63,284,542 | 99.55 | 98.24 | 99.18 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Forum kewaspadaa n dini masyarakat (FKDM) | 138,853,400 | 95,702,302 | 13,388,900 | 138,853,400 | 95,284,300 | 13,388,900 | 100.00 | 99.56 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah | 11,808,400 | 30,000,000 | 6,520,008 | 11,808,400 | 30,000,000 | 6,520,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah | 41,922,000 | 50,000,000 | 10,328,000 | 41,392,700 | 49,724,000 | 10,328,000 | 98.74 | 99.45 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|--------|--------|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di Daerah | 101,531,600 | 79,155,360 | 54,827,200 | 99,654,800 | 79,153,400 | 54,827,200 | 98.15 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara | 92,707,100 | 75,461,800 | - | 89,950,500 | 75,461,100 | 0 | 97.03 | 100.00 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal | 86,933,800 | 84,439,212 | - | 85,486,000 | 84,329,200 | 0 | 98.33 | 99.87 | - |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan | 247,532,500 | 153,054,000 | 61,284,700 | 247,157,500 | 152,851,000 | 61,284,700 | 99.85 | 99.87 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 169,402,000 | 154,378,000 | 58,411,050 | 167,897,000 | 153,358,500 | 58,235,000 | 99.11 | 99.34 | 99.70 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu | 75,380,600 | 70,000,000 | 23,425,000 | 74,130,600 | 68,980,500 | 23,425,000 | 98.34 | 98.54 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika | 94,021,400 | 84,378,000 | 34,986,050 | 93,766,400 | 84,378,000 | 34,810,000 | 99.73 | 100.00 | 99.50 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | | Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Masyarakat an | 429,467,575 | 345,640,437 | 149,949,950 | 419,202,575 | 343,426,272 | 149,949,950 | 97.61 | 99.36 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Forkom Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap perkembangan Kebudayaan /Kesenian Di daerah | 78,060,000 | 50,275,000 | 11,250,000 | 78,060,000 | 50,275,000 | 11,250,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - Pemantauan dan Evaluasi | 20,000,000 | 10,000,000 | 25,115,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 25,115,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | Ormas LSM/Penge mbangan Seni Budaya | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | 131,228,800 | 138,322,600 | 19,550,000 | 124,098,800 | 138,110,355 | 19,550,000 | 94.57 | 99.85 | 100.00 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemsyaraka tan/LSM | 76,350,000 | 50,800,000 | 23,176,000 | 75,765,000 | 50,558,680 | 23,176,000 | 99.23 | 99.52 | 100.00 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM | 52,450,000 | 48,405,000 | 21,150,000 | 51,200,000 | 46,644,400 | 21,150,000 | 97.62 | 96.36 | 100.00 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa | 71,378,775 | 47,837,837 | 49,708,950 | 70,078,775 | 47,837,837 | 49,708,950 | 98.18 | 100.00 | 100.00 | |

Tabel 2.3

Capaian Realisasi Program Kegiatan Renja sampai dengan Triwulan II

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Anggaran (Rp) | Realisasi | | | | Permasalahan/Solusi |
|----|---|--------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | Rp. | % | Rp. | % | |
| | PAGU ANGGARAN | | 11,617,914,984.00 | 1,015,672,165.00 | 9.13 | 4,116,843,875.00 | 37.01 | |
| | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 8,365,054,484.00 | 944,733,665.00 | 11.29 | 3,317,028,753.00 | 39.65 | |
| | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 111,987,000.00 | - | - | 49,364,000.00 | 44.08 | |
| 1 | 8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2,220,000.00 | - | - | 2,220,000.00 | 100.00 | |
| 2 | 8.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 2,220,000.00 | - | - | - | - | |
| 3 | 8.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 2,220,000.00 | - | - | - | - | |
| 4 | 8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | 570,000.00 | - | - | - | - | |
| 5 | 8.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | 570,000.00 | - | - | - | - | |
| 6 | 8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 15,480,000.00 | - | - | 2,220,000.00 | 14.34 | |
| 7 | 8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 88,707,000.00 | - | - | 44,924,000.00 | 50.64 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 7,176,735,776.00 | 917,158,665.00 | 12.78 | 2,997,587,273.00 | 41.77 | |
| 8 | 8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 6,142,099,151.00 | 757,666,665.00 | 12.34 | 2,584,759,973.00 | 42.08 | |
| 9 | 8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 974,550,000.00 | 159,492,000.00 | 16.37 | 400,744,325.00 | 41.12 | |
| 10 | 8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 5,816,625.00 | - | - | 1,797,975.00 | 30.91 | |
| 11 | 8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 760,000.00 | - | - | - | - | |
| 12 | 8.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 48,500,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 20.62 | |
| 13 | 8.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | 2,220,000.00 | - | - | 285,000.00 | 12.84 | |
| 14 | 8.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 1,140,000.00 | - | - | - | - | |
| 15 | 8.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 1,650,000.00 | - | - | - | - | |
| | 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 44,093,000.00 | - | - | - | - | |
| 16 | 8.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | 2,125,000.00 | - | - | - | - | |
| 17 | 8.01.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | 475,000.00 | - | - | - | - | |
| 18 | 8.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 40,543,000.00 | - | - | - | - | |
| 19 | 8.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 950,000.00 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--------------|--|
| | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 57,051,963.00 | - | - | - | - | |
| 20 | 8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | 24,182,213.00 | - | - | - | - | |
| 21 | 8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | 32,869,750.00 | - | - | - | - | |
| | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 254,604,845.00 | - | - | 66,133,464.00 | 25.97 | |
| 22 | 8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 8,182,020.00 | - | - | 5,202,312.00 | 63.58 | |
| 23 | 8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 25,199,825.00 | - | - | 10,963,300.00 | 43.51 | |
| 24 | 8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 60,047,750.00 | - | - | 29,697,000.00 | 49.46 | |
| 25 | 8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 15,120,000.00 | - | - | 5,980,000.00 | 39.55 | |
| 26 | 8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 16,000,000.00 | - | - | 2,125,000.00 | 13.28 | |
| 27 | 8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 130,055,250.00 | - | - | 12,165,852.00 | 9.35 | |
| | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 169,242,875.00 | - | - | - | - | |
| 28 | 8.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | - | - | - | - | - | |
| 29 | 8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 169,242,875.00 | - | - | - | - | |
| | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 260,992,525.00 | - | - | 102,370,127.00 | 39.22 | |
| 30 | 8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 12,480,700.00 | - | - | 7,212,100.00 | 57.79 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| 31 | 8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 79,862,000.00 | - | - | 30,161,277.00 | 37.77 | |
| 32 | 8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35,400,000.00 | - | - | - | - | |
| 33 | 8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 133,249,825.00 | - | - | 64,996,750.00 | 48.78 | |
| | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 290,346,500.00 | 27,575,000.00 | 9.50 | 101,573,889.00 | 34.98 | |
| 34 | 8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 149,850,000.00 | 10,500,000.00 | 7.01 | 56,748,889.00 | 37.87 | |
| 35 | 8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 109,525,000.00 | 17,075,000.00 | 15.59 | 41,550,000.00 | 37.94 | |
| 36 | 8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26,770,000.00 | - | - | 3,275,000.00 | 12.23 | |
| 37 | 8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4,201,500.00 | - | - | - | - | |
| | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 378,758,325.00 | 70,938,500.00 | 18.73 | 130,173,375.00 | 34.37 | |
| | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 378,758,325.00 | 70,938,500.00 | 18.73 | 130,173,375.00 | 34.37 | |
| 38 | 8.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | 4,538,000.00 | - | - | 4,538,000.00 | 100.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------|
| 39 | 8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | 6,376,000.00 | - | - | - | - |
| 40 | 8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | 154,647,250.00 | 70,938,500.00 | 45.87 | 99,188,500.00 | 64.14 |
| 41 | 8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | 88,171,025.00 | - | - | - | - |
| 42 | 8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | 125,026,050.00 | - | - | 26,446,875.00 | 21.15 |
| | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | 309,558,300.00 | - | - | 155,939,950.00 | 50.37 |
| | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | 309,558,300.00 | - | - | 155,939,950.00 | 50.37 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|---|---|---------------|--------|
| 43 | 8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | 3,760,000.00 | - | - | 3,760,000.00 | 100.00 |
| 44 | 8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | 6,260,000.00 | - | - | 6,260,000.00 | 100.00 |
| 45 | 8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | 26,832,000.00 | - | - | - | - |
| 46 | 8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | 114,871,050.00 | - | - | 54,707,000.00 | 47.62 |
| 47 | 8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | 157,835,250.00 | - | - | 91,212,950.00 | 57.79 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--|
| | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | 1,464,993,575.00 | | - | - | 337,586,875.00 | 23.04 | |
| | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | 1,464,993,575.00 | | - | - | 337,586,875.00 | 23.04 | |
| 48 | 8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | 4,129,000.00 | | - | - | 4,129,000.00 | 100.00 | |
| 49 | 8.01.04.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | 3,815,500.00 | | - | - | - | - | |
| 50 | 8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | 1,302,089,925.00 | | - | - | 314,400,000.00 | 24.15 | |
| 51 | 8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | 60,353,525.00 | | - | - | - | - | |
| 52 | 8.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | 94,605,625.00 | | - | - | 19,057,875.00 | 20.14 | |
| | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | 204,967,250.00 | | - | - | 53,367,597.00 | 26.04 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|---|---|----------------------|--------------|--|
| | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 204,967,250.00 | | - | - | 53,367,597.00 | 26.04 | |
| 53 | 8.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | 3,843,000.00 | | - | - | 3,843,000.00 | 100.00 | |
| 54 | 8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | 3,843,000.00 | | - | - | - | - | |
| 55 | 8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | 29,315,500.00 | | - | - | 29,315,500.00 | 100.00 | |
| 56 | 8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | 67,324,900.00 | | - | - | 13,380,000.00 | 19.87 | |
| 57 | 8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | 100,640,850.00 | | - | - | 6,829,097.00 | 6.79 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--|
| | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | 401,758,050.00 | | - | - | 122,747,325.00 | 30.55 | |
| | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | 401,758,050.00 | | - | - | 122,747,325.00 | 30.55 | |
| 58 | 8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | 2,894,000.00 | | - | - | 1,447,000.00 | 50.00 | |
| 59 | 8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | 43,990,000.00 | | - | - | 4,988,000.00 | 11.34 | |
| 60 | 8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | 42,900,000.00 | | - | - | 7,100,000.00 | 16.55 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------|---|---|---------------|-------|--|
| 61 | 8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | 118,399,750.00 | - | - | 61,243,250.00 | 51.73 | |
| 62 | 8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | 159,136,075.00 | - | - | 42,259,450.00 | 26.56 | |
| 63 | 8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | | 34,438,225.00 | - | - | 5,709,625.00 | 16.58 | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2016 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga teknis Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, memiliki tugas untuk menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat madani di bidang pemahaman dan kemampuan komponen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi di Sulawesi Tengah, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Sulawesi Tengah.
3. Terselenggaranya Pengembangan Ideologi Bangsa Dan Wawasan Kebangsaan untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Sulawesi Tengah dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, dan penanaman nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara demi NKRI.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistim politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.

Pada Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik;
- c. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- d. Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

Pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan 6 program, 13 Kegiatan dan 61 sub kegiatan.

B. Permasalahan yang dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta dalam menghadapi masa pandemic Covid-19 adalah :

1. Masalah yang bersifat Internal :
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan;
 - c. Terbatasnya dukungan anggaran dalam menunjang tugas dan tanggungjawab kewenangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Bidang Wawasan Kebangsaan :
 - a. Kurangnya pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - b. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Konsensus Dasar Bernegara;
 - c. Menurunnya rasa Nasionalisme masyarakat.
3. Bidang Kewaspadaan :
 - a. Masih adanya ancaman radikalisme, separatisme, ekstrimisme dan potensi gangguan kerawanan oleh pelaku aksi terorisme;
 - b. Masih rendahnya Pemahaman Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap masalah-masalah sosial dan penanganannya;
 - c. Masih rendahnya pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing serta pengawasan di Wilayah Perbatasan antar Provinsi dan antar Negara.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan :
 - a. Masih banyaknya penyalahgunaan Narkoba;
 - b. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat tentang Sosial Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagai kekuatan pemersatu Bangsa;
 - c. Maraknya budaya asing yang kurang sesuai dengan Nilai-Nilai Budaya Bangsa.
 - d. Masih kurangnya Penguatan, Pemberdayaan dan Pembinaan Ormas.
5. Bidang Politik :
 - a. Masih terbatasnya peran Partai Politik pada Masyarakat di Bidang Pendidikan Politik,
 - b. Masih rendahnya Pemahaman Politik di Masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada **tabel 2.3**

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catan Penting |
|--|-----------------|--|----------------|----------------------|--|-----------------|--|----------------|----------------------|------------------|
| Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 11,617,914,984.00 | | | | | 15,520,089,984.00 | |
| 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Sulawesi Tengah | Persentase Capaian Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan | | 1,483,380,525.00 | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Sulawesi Tengah | Persentase Capaian Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan | | 5,535,440,575.00 | |
| 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Sulawesi Tengah | Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | 1,483,380,525.00 | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Sulawesi Tengah | Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | 5,535,440,575.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------|--------------|--|-----------------|---|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sulawesi Tengah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 2 Orang 0 | 4,129,000.00 | 8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sulawesi Tengah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 2 Orang 0 | 4,129,000.00 | |
| 8.01.04.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sulawesi Tengah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 2 Orang 0 | 3,815,500.00 | 8.01.04.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sulawesi Tengah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 2 Orang 0 | 3,815,500.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------------------------------|------------------|--|-----------------|---|------------------------------|------------------|--|
| 8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sulawesi Tengah | Ormas yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan | 30 Organisasi Kemasyarakatan | 1,313,295,550.00 | 8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sulawesi Tengah | Ormas yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan | 30 Organisasi Kemasyarakatan | 5,379,589,925.00 | |
| 8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sulawesi Tengah | Ormas yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan | 60 Organisasi Kemasyarakatan | 64,809,850.00 | 8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sulawesi Tengah | Ormas yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan | 60 Organisasi Kemasyarakatan | - | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------|----------------------------|--|----------------------------|---|-----------|----------------------------|--|
| 8.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan di Bidang Organisasi Kemasyarakatan | 1 Laporan | 97,330,625 .00 | 8.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan di Bidang Organisasi Kemasyarakatan | 1 Laporan | 147,906,15 0.00 | |
| 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya | | 250,580,40 0.00 | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya | | 181,511,25 0.00 | |
| 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Sula wesi Teng ah | Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 250,580,40 0.00 | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Sula wesi Teng ah | Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 181,511,25 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|--------------|--|-----------------|--|--------------|--------------|--|
| 8.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sulawesi Tengah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 2 Orang 0 | 3,843,000.00 | 8.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sulawesi Tengah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 2 Orang 0 | 3,843,000.00 | |
| 8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sulawesi Tengah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 2 Orang 0 | 3,843,000.00 | 8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sulawesi Tengah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 2 Orang 0 | 3,843,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang Dalam Tim Fasilitasi Ormas dan Kerukunan Umat Beragama | 2 Orang 5 | 29,315,500 .00 | 8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang Dalam Tim Fasilitasi Ormas dan Kerukunan Umat Beragama | 2 Orang 5 | 29,315,500 .00 | |
| 8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | 1 Orang 8 0 | 95,889,750 .00 | 8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | 1 Orang 8 0 | 66,324,900 .00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------|----------------------------|---|----------------------------|---|-----------|----------------------------|--|
| 8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan di Bidang Ketahanan Ekonomi | 4 Laporan | 117,689,15 0.00 | 8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan di Bidang Ketahanan Ekonomi | 4 Laporan | 78,184,850 .00 | |
| 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | | 442,758,40 0.00 | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | | 358,758,07 5.00 | |
| 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 442,758,40 0.00 | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 358,758,07 5.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------|------------------|--|----------------------------|---|--------------|------------------|--|
| 8.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Wawasan Kebangsaan | 2 Orang 0 | 4,538,000. 00 | 8.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Wawasan Kebangsaan | 2 Orang 0 | 4,538,000. 00 | |
| 8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Tim Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara | 2 Orang 0 | 9,452,000. 00 | 8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Tim Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara | | - | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------|--------------------|--|----------------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| 8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang Dalam Tim Wawasan Kebangsaan dan yang mengikuti Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan | 8 Orang 0 | 156,579,25 0.00 | 8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang Dalam Tim Wawasan Kebangsaan dan yang mengikuti Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan | 8 Orang 0 | 154,647,25 0.00 | |
| 8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan | 1 Orang 2 0 | 139,132,05 0.00 | 8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan | 1 Orang 2 0 | 88,171,025 .00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------|----------------------------|--|
| 8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 4 Laporan | 133,057,10 0.00 | 8.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 4 Laporan | 111,401,80 0.00 | |
| 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Pembinaan Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualits dan Fasilitasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial | | 465,758,35 0.00 | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Pembinaan Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualits dan Fasilitasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial | | 599,913,87 5.00 | |
| 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Sula wesi Teng ah | Meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah | | 465,758,35 0.00 | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Sula wesi Teng ah | Meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah | | 599,913,87 5.00 | |

| Sosial | | | | Sosial | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------|------------------|--|----------------------------|---|--------------|------------------|
| 8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Kewaspadaan | 4 Orang 0 | 2,894,000. 00 | 8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Kewaspadaan | 4 Orang 0 | 2,894,000. 00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Tim Perumusan Kebijakan Bidang Kewaspadaan | 2 Orang 6 0 | 43,990,000 .00 | 8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Tim Perumusan Kebijakan Bidang Kewaspadaan | 2 Orang 6 0 | 43,990,000 .00 | |
|--|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|
| <p>8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> | <p>Sula wesi Teng ah</p> | <p>Jumlah Orang dalam Tim yang difasilitasi Bidang Kewaspadaan</p> | <p>2 Orang 2</p> | <p>47,400,000 .00</p> | <p>8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> | <p>Sula wesi Teng ah</p> | <p>Jumlah Orang dalam Tim yang difasilitasi Bidang Kewaspadaan</p> | <p>2 Orang 2</p> | <p>40,400,000 .00</p> | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------|--|
| 8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial | 2 Orang 1 0 | 159,582,85 0.00 | 8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial | 2 Orang 1 0 | 260,515,90 0.00 | |
|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|----------------|--------------------|--|----------------------------|---|----------------|--------------------|--|
| 8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan | 2 Laporan 8 | 177,453,00 0.00 | 8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan | 2 Laporan 8 | 146,192,07 5.00 | |
| 8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Pembahasan Isu-Isu Strategis Daerah | 3 Orang 0 | 34,438,500 .00 | 8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Pembahasan Isu-Isu Strategis Daerah | 3 Orang 0 | 105,921,90 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|---|--|----------------------------|--|
| 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Pemahaman dan Partisipasi Politik Stakeholder/M asyarakat | | 373,558,27 5.00 | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Pemahaman dan Partisipasi Politik Stakeholder/M asyarakat | | 292,558,30 0.00 | |
| 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Sula wesi Teng ah | Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik | | 373,558,27 5.00 | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Sula wesi Teng ah | Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik | | 292,558,30 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--|
| <p>8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> | <p>Sula wesi Teng ah</p> | <p>Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Politik</p> | <p>1 Orang 5</p> | <p>3,760,000. 00</p> | <p>8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> | <p>Sula wesi Teng ah</p> | <p>Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Politik</p> | <p>1 Orang 5</p> | <p>3,760,000. 00</p> | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------|------------------|--|----------------------------|---|--------------|------------------|--|
| 8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Politik | 1 Orang 5 | 6,260,000. 00 | 8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Politik | 1 Orang 5 | 6,260,000. 00 | |
|--|----------------------------|---|--------------|------------------|--|----------------------------|---|--------------|------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------|-------------------|--|----------------------------|--|--------------|------------------|--|
| 8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Indonesia | 5 Orang 0 | 26,832,000 .00 | 8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Indonesia | 5 Orang 0 | 7,914,000. 00 | |
|--|----------------------------|--|--------------|-------------------|--|----------------------------|--|--------------|------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------|--------------------|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Indonesia | 1 Orang 5 0 | 178,871,00 0.00 | 8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Indonesia | 1 Orang 5 0 | 55,757,000 .00 | |
|--|----------------------------|--|-------------------|--------------------|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|------------------------------|---|----------------------------|--|-----------|------------------------------|--|
| 8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Data situasi dan kondisi Daerah tentang Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Tengah | 4 Laporan | 157,835,27 5.00 | 8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Sula wesi Teng ah | Data situasi dan kondisi Daerah tentang Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Tengah | 4 Laporan | 218,867,30 0.00 | |
| 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | | 8,601,879, 034.00 | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Sula wesi Teng ah | Persentase Capaian Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | | 8,551,907, 909.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------|----------------------------|--|----------------------------|---|-----------|----------------------------|--|
| 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah dokumen perencanaan | | 122,232,00 0.00 | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah dokumen perencanaan | | 117,378,00 0.00 | |
| 8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 5 dokumen | 6,660,000. 00 | 8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 5 dokumen | 2,220,000. 00 | |
| 8.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen RKA | 1 dokumen | 2,220,000. 00 | 8.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen RKA | 1 dokumen | 2,220,000. 00 | |
| 8.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 dokumen | 2,220,000. 00 | 8.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 dokumen | 2,220,000. 00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------|-------------------|---|----------------------------|---|-----------|-------------------|--|
| 8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen DPA | 1 dokumen | 570,000.00 | 8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen DPA | 1 dokumen | 570,000.00 | |
| 8.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen DPA Perubahan | 1 dokumen | 570,000.00 | 8.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen DPA Perubahan | 1 dokumen | 570,000.00 | |
| 8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja | 1 dokumen | 21,285,000 .00 | 8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja | 1 dokumen | 15,480,000 .00 | |
| 8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja | 1 dokumen | 88,707,000 .00 | 8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja | 1 dokumen | 94,098,000 .00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------------|------------------------------|--|----------------------------|--|----------------|------------------------------|--|
| 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan pertanggungjaw aban Keuangan | | 7,195,914, 688.00 | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan pertanggungjaw aban Keuangan | | 7,333,614, 822.00 | |
| 8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 1 laporan 4 | 6,142,078, 063.00 | 8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 1 laporan 4 | 6,142,158, 197.00 | |
| 8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 laporan 2 | 993,750,00 0.00 | 8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 laporan 2 | 1,169,870, 000.00 | |
| 8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan | 4 laporan | 5,816,625. 00 | 8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan | 4 laporan | 5,816,625. 00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------|---------------|---|-----------------|--|-----------|---------------|--|
| 8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Sulawesi Tengah | Jumlah Laporan Akutansi Perangkat Daerah | 1 laporan | 760,000.00 | 8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Sulawesi Tengah | Jumlah Laporan Akutansi Perangkat Daerah | 1 laporan | 760,000.00 | |
| 8.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Sulawesi Tengah | Jumlah Dokumen Keuangan SKPD | 1 dokumen | 48,500,000.00 | 8.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Sulawesi Tengah | Jumlah Dokumen Keuangan SKPD | 1 dokumen | 10,000,000.00 | |
| 8.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Sulawesi Tengah | Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP | 1 dokumen | 2,220,000.00 | 8.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Sulawesi Tengah | Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP | 1 dokumen | 2,220,000.00 | |
| 8.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Sulawesi Tengah | Jumlah Laporan Keuangan | 2 laporan | 1,140,000.00 | 8.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Sulawesi Tengah | Jumlah Laporan Keuangan | 2 laporan | 1,140,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------|---------------------------|--|----------------------------|--|-----------|---------------------------|--|
| 8.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Prognosis | 1 laporan | 1,650,000. 00 | 8.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Prognosis | 1 laporan | 1,650,000. 00 | |
| 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | 6 laporan | 54,593,000 .00 | 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | 6 laporan | 15,553,000 .00 | |
| 8.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD | 1 laporan | 2,125,000. 00 | 8.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD | 1 laporan | 2,125,000. 00 | |
| 8.01.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 laporan | 475,000.00 | 8.01.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 laporan | 475,000.00 | |
| 8.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah | 3 laporan | 40,543,000 .00 | 8.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah | 3 laporan | 12,003,000 .00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------|---------------------------|---|----------------------------|---|-----------|---------------------------|--|
| 8.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 laporan | 11,450,000 .00 | 8.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 laporan | 950,000.00 | |
| 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | | 57,051,963 .00 | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | | 32,869,750 .00 | |
| 8.01.01.1.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Sula wesi Teng ah | | 1 | | 8.01.01.1.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | | | | | |
| 8.01.01.1.05.03 Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian | Sula wesi Teng ah | | 1 2 | | 8.01.01.1.05.03 Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | |
| 8.01.01.1.05.04 Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Sula wesi Teng ah | | 1 | | 8.01.01.1.05.04 Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | | | | | |
| 8.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Sula wesi Teng ah | | 1 | | 8.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|------------|----------------------------|--|----------------------------|---|---------|----------------------------|--|
| 8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Sula wesi Teng ah | Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 2 org 0 | 24,182,213 .00 | 8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | | | | | |
| 8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Sula wesi Teng ah | | | 32,869,750 .00 | 8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Sula wesi Teng ah | | | 32,869,750 .00 | |
| 8.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan | Sula wesi Teng ah | | | | 8.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan | Sula wesi Teng ah | | | | |
| 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | | 259,604,84 5.00 | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | | 274,531,84 5.00 | |
| 8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 1 paket | 8,182,020. 00 | 8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 1 paket | 8,182,020. 00 | |
| 8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 1 paket | 25,199,825 .00 | 8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 1 paket | 118,199,82 5.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------|----------------------------|--|----------------------------|---|-----------|----------------------------|--|
| 8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 1 paket | 60,047,750 .00 | 8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 1 paket | 60,047,750 .00 | |
| 8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 1 paket | 15,120,000 .00 | 8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 1 paket | 15,120,000 .00 | |
| 8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 4 kali | 21,000,000 .00 | 8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Sula wesi Teng ah | Jumlah Paket Pengadaan | 4 kali | 11,625,000 .00 | |
| 8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan | 1 laporan | 130,055,25 0.00 | 8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sula wesi Teng ah | Jumlah Laporan | 1 laporan | 61,357,250 .00 | |
| 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | | 291,680,52 5.00 | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | | 169,242,87 5.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---------|----------------------------|---|----------------------------|---|---------|----------------------------|--|
| 8.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | 102,000,00 0.00 | 8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| 8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | 189,680,52 5.00 | 8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 paket | 169,242,87 5.00 | |
| 8.01.01.1.07.11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Sula wesi Teng ah | | 3 unit | | 8.01.01.1.07.11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | | |
| 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | | 266,802,52 5.00 | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sula wesi Teng ah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | | 242,592,52 5.00 | |
| 8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sula wesi Teng ah | Jumlah pengiriman Dokumen | 1 paket | 12,480,700 .00 | 8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sula wesi Teng ah | Jumlah pengiriman Dokumen | 1 paket | 12,480,700 .00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------|-----------------------|---|-----------------|--|--------------|-----------------------|--|
| 8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sulawesi Tengah | Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 bulan 2 | 85,672,000.00 | 8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sulawesi Tengah | Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 bulan 2 | 77,062,000.00 | |
| 8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sulawesi Tengah | Jumlah Jasa | 1 paket | 35,400,000.00 | 8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sulawesi Tengah | Jumlah Jasa | 1 paket | 19,800,000.00 | |
| 8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Sulawesi Tengah | Jumlah Jasa | 1 paket | 133,249,825.00 | 8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Sulawesi Tengah | Jumlah Jasa | 1 paket | 133,249,825.00 | |
| 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sulawesi Tengah | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | | 353,999,488.00 | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sulawesi Tengah | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | | 366,125,092.00 | |
| 8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sulawesi Tengah | Jumlah Jasa | 1 paket | 149,850,000.00 | 8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sulawesi Tengah | Jumlah Jasa | 1 paket | 184,850,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------|--------------------|--|----------------------------|---|---------|--------------------|--|
| 8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Jasa | 1 paket | 109,525,00 0.00 | 8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Sula wesi Teng ah | Jumlah Jasa | 1 paket | 142,935,00 0.00 | |
| 8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 1 paket | 26,770,000 .00 | 8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 1 paket | 26,770,000 .00 | |
| 8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah Gedung yang dipelihara | 1 paket | 67,854,488 .00 | 8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah Gedung yang dipelihara | 1 paket | 11,570,092 .00 | |
| 8.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehab ilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 1 paket | | 8.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehab ilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sula wesi Teng ah | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2021 yang sesuai dengan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum antara lain :

1. Peningkatan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional ;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial ; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa ;
3. Terorisme dan radikalisme;
4. Melemahnya pemahaman dan implementasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosialnya ;
5. Kualitas demokrasi ; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum ;
6. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Renja-P Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan :
 - a. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Demokrasi
 - b. Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan Ham
- 2) Sasaran :
 - a. Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - b. Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik;
 - c. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. Meningkatkan kegiatan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (RAD-PKS)

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan telaahan, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaahan Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) Tahun ke depan, yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Membangun mental masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, serta mempertahankan NKRI;
- c. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian dan Pencegahan Konflik guna menjaga kondusifitas daerah;
- d. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
- e. Penguatan Kerukunan antar Umar Beragama dalam menjaga Ketahanan Bangsa;
- f. Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 akan melaksanakan 6 program, 13 Kegiatan dan 61 sub kegiatan. Untuk besaran anggaran pada program dan kegiatan yang masuk dalam belanja Perubahan Renja di Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan dengan keterangan sebagai berikut :

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1. Pagu Anggaran Awal | : | Rp. 11.617.914.984.- | |
| 1) Belanja Operasi | : | Rp. 11.326.234.456,- | (97,49 %) |
| - Belanja Pegawai | : | Rp. 6.142.078.063,- | (52,87 %) |
| - Belanja Barang dan Jasa | : | Rp. 3.934.156.396,- | (33,86 %) |
| - Belanja Hibah | : | Rp. 1.250.000.000,- | (10,76 %) |
| 2) Belanja Modal | : | Rp. 291.680.525,- | (2,51 %) |
| - Belana Modal | : | Rp. 291.680.525,- | (2,51 %) |
| | | | |
| 2. Pagu Anggaran Perubahan | : | Rp. 15.520.089.984.- | |
| 1) Belanja Operasi | : | Rp. 15.350.847.109,- | (98,81 %) |
| - Belanja Pegawai | : | Rp. 6.142.099.151,- | (39,58 %) |
| - Belanja Barang dan Jasa | : | Rp. 3.878.747.958,- | (24,99 %) |
| - Belanja Hibah | : | Rp. 5.330.000.000,- | (34,34 %) |
| 2) Belanja Modal | : | Rp. 169.242.875,- | (1,09 %) |
| - Belana Modal | : | Rp. 169.242.875,- | (1,09 %) |

Kebijakan Keuangan Realisasi anggaran belanja sampai dengan tanggal **31 Agustus 2021** adalah :
Rp. 5.759.810.255,- (49,58 %)

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|------------------|
| Belanja Operasi | : | Rp. 5.759.810.255,- | (49,58 %) |
| - Belanja Pegawai | : | Rp. 3.637.938.505,- | (31,32 %) |
| - Belanja Barang dan Jasa | : | Rp. 1.711.871.750,- | (14,73 %) |
| - Belanja Hibah | : | Rp. 410.000.000,- | (3,53 %) |
| Belanja Modal | : | Rp. - | |
| - Belanja Modal | : | Rp. | |

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rencana program dan kegiatan tahun 2021, yang diuraikan dalam **Tabel 4.1** sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Renja Perubahan 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcomes), Kegiatan (Output) Dan Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | | | Bertambah/ Berkurang | Catatan |
|--------|---------|-----------------|---|---|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | Targ et | DPA 2021 | Renja Perubahan 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 01.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | | | | 11,515,914,984 | 15,520,089,984 | 4,004,175,000 | |
| | | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | % | | 8,499,879,034 | 8,551,907,909 | 52,028,875 | |
| | | 8.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 122,232,000 | 117,378,000 | (4,854,000) | |
| | | 8.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 6,660,000.00 | 2,220,000 | (4,440,000) | |
| | | 8.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA | Dokumen | 1 | 2,220,000.00 | 2,220,000 | - | |
| | | 8.01.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Perubahan | Dokumen | 1 | 2,220,000.00 | 2,220,000 | - | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|----------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| | 8.01.01.1.01 .04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA | Dokumen | 1 | 570,000.00 | 570,000 | - | |
| | 8.01.01.1.01 .05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Perubahan | Dokumen | 1 | 570,000.00 | 570,000 | - | |
| | 8.01.01.1.01 .06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja | Dokumen | 1 | 21,285,000.00 | 15,480,000 | (5,805,000) | |
| | 8.01.01.1.01 .07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja | Dokumen | 1 | 88,707,000.00 | 94,098,000 | 5,391,000 | |
| | 8.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan pertanggungjawaban Keuangan | Laporan | 36 | 7,195,914,688 | 7,333,614,822 | 137,700,134 | |
| | 8.01.01.1.02 .01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | Laporan | 14 | 6,142,078,063.00 | 6,142,158,197 | 80,134 | |
| | 8.01.01.1.02 .02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Laporan | 12 | 993,750,000.00 | 1,169,870,000 | 176,120,000 | |
| | 8.01.01.1.02 .03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan | Laporan | 4 | 5,816,625.00 | 5,816,625 | - | |
| | 8.01.01.1.02 .04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 760,000.00 | 760,000 | - | |
| | 8.01.01.1.02 .05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 48,500,000.00 | 10,000,000 | (38,500,000) | |
| | 8.01.01.1.02 .06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP | Dokumen | 1 | 2,220,000.00 | 2,220,000 | - | |
| | 8.01.01.1.02 .07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan | Laporan | 2 | 1,140,000.00 | 1,140,000 | - | |
| | 8.01.01.1.02 .08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Prognosis | Laporan | 1 | 1,650,000.00 | 1,650,000 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|----------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | 8.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | Laporan | 4 | 54,593,000 | 15,553,000 | (39,040,000) | |
| | | 8.01.01.1.03 .01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD | Laporan | 1 | 2,125,000.00 | 2,125,000 | - | |
| | | 8.01.01.1.03 .03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 475,000.00 | 475,000 | - | |
| | | 8.01.01.1.03 .05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah | Laporan | 1 | 40,543,000.00 | 12,003,000 | (28,540,000) | |
| | | 8.01.01.1.03 .06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 1 | 11,450,000.00 | 950,000 | (10,500,000) | |
| | | 8.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | Laporan | 1 | 57,051,963 | 32,869,750 | (24,182,213) | |
| | | 8.01.01.1.05 .09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Laporan Pelatihan | Paket | | 24,182,213 | - | (24,182,213) | |
| | | 8.01.01.1.05 .10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi | Paket | 1 | 32,869,750 | 32,869,750 | - | |
| | | 8.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | Laporan | 10 | 259,604,845 | 274,531,845 | 14,927,000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|----------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 8.01.01.1.06 .01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Pengadaan | Paket | 1 | 8,182,020.00 | 8,182,020 | - | |
| | 8.01.01.1.06 .02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Pengadaan | Paket | 1 | 25,199,825.00 | 118,199,825 | 93,000,000 | |
| | 8.01.01.1.06 .05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Pengadaan | Paket | 1 | 60,047,750.00 | 60,047,750 | - | |
| | 8.01.01.1.06 .06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Laporan | Kali | 2 | 15,120,000.00 | 15,120,000 | - | |
| | 8.01.01.1.06 .08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Paket Pengadaan | Kali | 4 | 21,000,000.00 | 11,625,000 | (9,375,000) | |
| | 8.01.01.1.06 .09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan | Laporan | 1 | 130,055,250.00 | 61,357,250 | (68,698,000) | |
| | 8.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan | Laporan | 1 | 189,680,525 | 169,242,875 | (20,437,650) | |
| | 8.01.01.1.07 .06 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | Paket | 1 | 102,000,000.00 | 169,242,875 | 67,242,875 | |
| | 8.01.01.1.07 .06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | Paket | 1 | 189,680,525.00 | 169,242,875 | (20,437,650) | |
| | 8.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | Laporan | 15 | 266,802,525 | 242,592,525 | (24,210,000) | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|----------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 8.01.01.1.08 .01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman Dokumen | Paket | 1 | 12,480,700 | 12,480,700 | - | |
| | 8.01.01.1.08 .02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 | 85,672,000 | 77,062,000 | (8,610,000) | |
| | 8.01.01.1.08 .03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa | Paket | 1 | 35,400,000 | 19,800,000 | (15,600,000) | |
| | 8.01.01.1.08 .04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa | Paket | 1 | 133,249,825 | 133,249,825 | - | |
| | 8.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen ketatausahaan dan Kepegawaian | Laporan | 4 | 353,999,488 | 366,125,092 | 12,125,604 | |
| | 8.01.01.1.09 .01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa | Paket | 1 | 149,850,000 | 184,850,000 | 35,000,000 | |
| | 8.01.01.1.09 .02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan | Jumlah Jasa | Paket | 1 | 109,525,000 | 142,935,000 | 33,410,000 | |
| | 8.01.01.1.09 .06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Paket | 1 | 26,770,000 | 26,770,000 | - | |
| | 8.01.01.1.09 .09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung yang dipelihara | Paket | 1 | 67,854,488 | 11,570,092 | (56,284,396) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|----------------|-----|-------------|-------------|--------------|--|
| Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Demokrasi | Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Pemuda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase (%) | | 442,758,400 | 358,758,075 | (84,000,325) | |
| | | 8.01.02.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 442,758,400 | 358,758,075 | (84,000,325) | |
| | | 8.01.02.1.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Wawasan Kebangsaan | Dokumen | 20 | 4,538,000 | 4,538,000 | - | |
| | | 8.01.02.1.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Tim Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara | Dokumen | 20 | 9,452,000 | - | (9,452,000) | |
| | | 8.01.02.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan | Orang | 80 | 156,579,250 | 154,647,250 | (1,932,000) | |
| | | 8.01.02.1.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan | Orang | 120 | 139,132,050 | 88,171,025 | (50,961,025) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|--|----------------|----|-------------|-------------|--------------|--|
| | | 8.01.02.1.01 .05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Laporan | 4 | 133,057,100 | 111,401,800 | (21,655,300) | |
| Meningkat nya Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Demokrasi | Meningkat kan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik | 8.01.03. | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Peningkatan partisipasi pemilih (%) dan wajib pilih (orang) di lokus/kabupaten prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah | Persentase (%) | | 373,558,275 | 292,558,300 | (80,999,975) | |
| | | 8.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik | | | 373,558,275 | 292,558,300 | (80,999,975) | |
| | | 8.01.03.1.01 .01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Politik | Dokumen | 15 | 3,760,000 | 3,760,000 | - | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|---------|-----|-------------|------------|---------------|--|
| | 8.01.03.1.01 .02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Politik | Dokumen | 15 | 6,260,000 | 6,260,000 | - | |
| | 8.01.03.1.01 .03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Indonesia | Orang | 50 | 26,832,000 | 7,914,000 | (18,918,000) | |
| | 8.01.03.1.01 .04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Indonesia | Orang | 150 | 178,871,000 | 55,757,000 | (123,114,000) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---|-----------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 8.01.03.1.01 .05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Data situasi dan kondisi Daerah tentang Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Tengah | Laporan | 4 | 157,835,275 | 218,867,300 | 61,032,025 | |
| Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Demokrasi | Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah | Persentase (%) | | 1,483,380,525 | 5,535,440,575 | 4,052,060,050 | |
| | | 8.01.04.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | 130 | 1,483,380,525 | 5,535,440,575 | 4,052,060,050 | |
| | | 8.01.04.1.01 .01 | Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen | 20 | 4,129,000.00 | 4,129,000 | - | |
| | | 8.01.04.1.01 .02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Dokumen | 20 | 3,815,500.00 | 3,815,500 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|---------------------------|----|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | 8.01.04.1.01 .03 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Ormas yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan | Organisasi Kemasyarakatan | 30 | 1,313,295,550.00 | 5,379,589,925 | 4,066,294,375 | Dana Hibah Sebesar Rp. 5.330.000.000 |
| | | 8.01.04.1.01 .04 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Ormas yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan | Organisasi Kemasyarakatan | 60 | 64,809,850.00 | - | (64,809,850) | |
| | | 8.01.04.1.01 .05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan di Bidang Organisasi Kemasyarakatan | Laporan | | 97,330,625.00 | 147,906,150 | 50,575,525 | |
| | Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase peningkatan Ormas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase (%) | | 250,580,400 | 181,511,250 | (69,069,150) | |
| | | 8.01.05.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial | | | 250,580,400 | 181,511,250 | (69,069,150) | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|---------|-----|------------|------------|--------------|--|
| | | | | dan Budaya | | | | | | |
| | | 8.01.05.1.01 .01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Dokumen | 20 | 3,843,000 | 3,843,000 | - | |
| | | 8.01.05.1.01 .02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tim Perumusan Kebijakan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Dokumen | 20 | 3,843,000 | 3,843,000 | - | |
| | | 8.01.05.1.01 .03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Orang | 25 | 29,315,500 | 29,315,500 | - | |
| | | 8.01.05.1.01 .04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Orang | 180 | 95,889,750 | 66,324,900 | (29,564,850) | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 8.01.05.1.01 .05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan di Bidang Ketahanan Ekonomi | Laporan | 4 | 117,689,150 | 78,184,850 | (39,504,300) | |
| Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM | Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah | 8.01.06. | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Peningkatan Kualitas Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial yang tepat waktu dan sesuai standar/ketentuan | Persentase (%) | | 465,758,350 | 599,913,875 | 134,155,525 | |
| | | 8.01.06.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah | | | 465,758,350 | 599,913,875 | 134,155,525 | |
| | | 8.01.06.1.01 .01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tim Penyusun Program Kerja di Bidang Kewaspadaan | Dokumen | 4 | 2,894,000 | 2,894,000 | - | |
| | | 8.01.06.1.01 .02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tim Perumusan Kebijakan Bidang Kewaspadaan | Dokumen | 4 | 43,990,000 | 43,990,000 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|---|---------|-----|-------------|-------------|--------------|--|
| | | 8.01.06.1.01 .03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang dalam Tim yang difasilitasi Bidang Kewaspadaan | Orang | 22 | 47,400,000 | 40,400,000 | (7,000,000) | |
| | | 8.01.06.1.01 .04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial | Orang | 210 | 159,582,850 | 260,515,900 | 100,933,050 | |
| | | 8.01.06.1.01 .05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan | Laporan | 28 | 177,453,000 | 146,192,075 | (31,260,925) | |
| | | 8.01.06.1.01 .06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Pembahasan Isu-Isu Strategis Daerah | Orang | 30 | 34,438,500 | 105,921,900 | 71,483,400 | |

**BAB V
PENUTUP**

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Perubahan Renja Tahun 2021 ini wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih optimal, efisien dan akuntabel.

Palu,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 198903 1 004